

Sah: Komisi Pelindung Koruptor

Kasus korupsi bantuan sosial yang diduga melibatkan politikus PDI Perjuangan, Herman Hery dan Ihsan Yunus, mandek. Di bawah perlindungan para petinggi KPK

TEPAT kiranya kepanjangan KPK berubah menjadi “komisi pelindung koruptor”. Setidaknya hal itu terlihat pada saat lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut mengusut kasus korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19. Bukannya mengejar pelaku tertinggi, Komisi malah meloloskannya dari proses hukum.

Akhir tahun lalu, dengan penyidik-penyidik yang kini telah disingkirkan melalui “tes wawasan kebangsaan”, KPK menangkap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Setelah itu, sejumlah pengusaha yang menyuap Juliari dan anak buahnya demi mendapatkan kuota dihukum. Tapi tokoh-tokoh partai politik yang diduga kuat terlibat dalam penggarangan bantuan untuk kelompok miskin itu sejauh ini masih melenggang bebas.

Hambatan terbesar pengusutan korupsi dana bansos itu justru muncul dari dalam KPK. Petinggi-petinggi lembaga itu terlihat membelokkan perkara ke pemain figuran. Pada Selasa, 23 November lalu, misalnya, petugas lembaga itu menggeledah satu tempat di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dilakukan atas perintah pimpinan, petugas mencari bukti keterlibatan pejabat di Kementerian Sosial. Langkah ini aneh. Sebab, pada saat yang sama, Firlil Bahuri dan pemimpin KPK lain menolak permintaan untuk bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan guna mengaudit proyek bansos.

Audit mendalam penyaluran bansos berupa barang kebutuhan pokok pada tahun lalu itu sangat penting. Di antaranya untuk mengetahui pihak yang paling diuntungkan. Sejumlah data menunjukkan, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Herman Hery dan

Ihsan Yunus, mendapatkan kuota terbesar dalam penyaluran.

Perusahaan yang terafiliasi dengan Herman, saat itu Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, menurut sejumlah saksi, mendapatkan kuota 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun. Adapun perusahaan yang terkait dengan Ihsan, Wakil Ketua Komisi Sosial DPR, memperoleh 4,6 juta paket senilai Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, keduanya diduga menguasai separuh bujet bansos untuk Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.

Meski diduga mendapatkan keuntungan jumbo yang tak wajar, nama Herman dan Ihsan tidak dicantumkan dalam berkas dakwaan Juliari dan terdakwa kasus korupsi bansos lain. Lazimnya berkas persidangan KPK, nama-nama yang terlibat selalu dicantumkan. Herman dan Ihsan aman sentosa. Usaha tim penyidik agar dilakukannya gelar perkara tentang keterlibatan dua politikus itu selalu kandas. Deputi Penindakan, yang bertanggung jawab dalam proses gelar perkara, terus menolak usul itu.

Sejak awal, pimpinan membatasi ruang gerak tim penyidik. Dari 27 izin penggeledahan Dewan Pengawas untuk kasus bantuan sosial, baru delapan yang dijalankan. Barangkali inilah yang dimaksud Firlil agar KPK berfokus pada pencegahan. Rupanya, pencegahan juga diterapkan pada pengusutan keterlibatan politikus partai penguasa dalam korupsi bansos.

Korupsi dana bansos merupakan kejahatan luar biasa karena mengambil jatah orang-orang yang setiap hari harus berjuang hidup-mati. Usaha mengaburkan pengusutan kasus itu demi melindungi orang-orang kuat tak kalah jahatnya. Pelakunya bisa dijerat karena melakukan *obstruction of justice* alias menghalang-halangi usaha mencari keadilan.

BERITA TERKAIT HALAMAN 72



Panas Proyek Listrik Wae Sano

Proyek listrik panas bumi Wae Sano mengancam keselamatan kampung masyarakat adat. Relokasi bukan solusi.

PROYEK Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wae Sano di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi contoh pembangunan tanpa perencanaan matang. Di tengah krisis iklim, mencari dan menyediakan energi baru dan terbarukan lewat panas bumi sebagai pengganti bahan bakar fosil yang polutif memang penting, tapi di atas semua itu pembangunan tetap harus mengutamakan masyarakat.

Lewat PT Geo Dipa Energi dan PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah mengeksplorasi sumur geotermal di Wae Sano sejak 2018. Pengeborannya dimulai tahun depan. Di Manggarai Barat, potensi energi panas bumi mencapai 910 megawatt, salah satu

yang terbesar di Indonesia. Proyek ini bagian dari program Flores Geothermal Island untuk menyuplai listrik di kawasan Flores dan sekitarnya yang didanai Bank Dunia.

Masalahnya, pengeboran geotermal mengancam keselamatan sepuluh kampung masyarakat adat Wae Sano. Lokasi sumur hanya 20 meter dari permukiman dan mata air terdekat yang selama ini menjadi sumber hidup penduduk desa. Terlalu dekatnya proyek dengan tempat tinggal masyarakat bisa membahayakan.

Pada 25 Januari 2021, gas H₂S bocor dari PLTP Bumi Sorik Marapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akibatnya, lima orang meninggal dan 46 orang dirawat. Di lokasi yang sama, pernah pula terjadi kebakaran yang mengakibatkan penduduk sekitar harus di-